

**KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGI MASYARAKAT
PENERIMA IZIN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KPHP GEDONG
WANI**

(Skripsi)

Oleh

**Raudhia Maghfirah
1814151061**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGI MASYARAKAT PENERIMA IZIN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KPHP GEDONG WANI

Oleh

RAUDHIA MAGHFIRAH

Program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dibuat untuk meningkatkan produktivitas kawasan hutan produksi yang mengalami penurunan kualitas dan tentunya bagi masyarakat akan memberikan kesempatan untuk berusaha di bidang hutan tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani. Penelitian ini dilaksanakan di KPHP Gedong Wani tepatnya di Desa Budi Lestari, Sinar Ogan, Jatibaru, Srikaton, dan Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada September sampai dengan November 2023. Penentuan responden dilakukan menggunakan rumus slovin dengan jumlah populasi 4544 orang dan menggunakan *standard error* sebesar 15%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan data kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur lalu dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian untuk kondisi sosial masyarakat menunjukkan bahwa persentase masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani yang memiliki pengetahuan tentang tata batas kawasan, mengikuti pertemuan antar anggota kelompok tani, membentuk jaringan sosial, memiliki transparansi dalam pemanfaatan sumber daya hutan; dan memiliki pengetahuan mengenai aturan HTR berjumlah lebih dari 50%. Sedangkan persentase masyarakat yang terlibat dalam pendampingan kelompok tani; mengikuti pelatihan budidaya dan teknologi; dan masih melestarikan budaya lokal kurang dari 50%. Hasil kondisi ekonomi masyarakat menunjukkan persentase masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani yang memiliki status kepemilikan rumah sendiri, kondisi rumah layak, dan menyatakan bahwa HTR menyediakan lapangan pekerjaan bagi anggota keluarga lain berjumlah lebih dari 50%. Sedangkan persentase masyarakat yang menyatakan bahwa jenis tanaman

yang paling menghasilkan di lahan garapan adalah tanaman kayu-kayuan dan yang memiliki penerimaan HTR di atas Rp3.000.000,00 kurang dari 50%. Hasil kondisi ekologi masyarakat menunjukkan persentase masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani yang menyatakan bahwa mereka mengetahui jenis tanaman, jumlah tanaman, usia tanaman, dan cara penanaman yang mereka gunakan berjumlah lebih dari 50%. Sedangkan persentase masyarakat yang menyatakan bahwa kesuburan lahan meningkat, kuantitas sumber air bertambah, kualitas air bertambah, kualitas sungai membaik, dan terjadi perubahan jenis tanaman di lahan garapan setelah program HTR diterapkan kurang dari 50%. Secara umum, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sudah cukup baik, sedangkan kondisi ekologi masyarakat masih kurang baik. Perlu adanya pengembangan dan pemanfaatan lahan dengan pola agroforestri kompleks yang berfokus pada tanaman kayu.

Kata kunci: hutan tanaman rakyat, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi ekologi

ABSTRACT

SOCIAL ECONOMIC AND ECOLOGICAL CONDITIONS OF COMMUNITY PLANTATION FOREST PERMIT HOLDERS IN KPHP GEDONG WAN

By

RAUDHIA MAGHFIRAH

The Community Forest Plantation Program (HTR) was created to increase the productivity of production forest areas that have experienced a decline in quality and, of course, to provide opportunities for communities to engage in forest plantation activities. This study aims to determine the social, economic, and ecological conditions of communities that have received HTR permits in the KPHP Gedong Wani. This study was conducted in the KPHP Gedong Wani, specifically in the villages of Budi Lestari, Sinar Ogan, Jatibaru, Srikaton, and Jati Indah, Tanjung Bintang District, South Lampung Regency, Lampung Province, from September to November 2023. Respondents were selected using the Slovin's formula with a population size of 4,544 people and a standard error of 15%. This study used a quantitative data approach supported by qualitative data. Data were collected through interviews, field observations, and literature studies, then analyzed descriptively. The results of research on social conditions show that more than 50% of the community receiving HTR permits in the Gedong Wani KPHP have knowledge of area boundaries, attend meetings between farmer group members, form social networks, have transparency in the use of forest resources, and have knowledge of HTR regulations. Meanwhile, the percentage of people involved in farmer group assistance; participating in cultivation and technology training; and still preserving local culture is less than 50%. The results of the economic conditions of the community show that the percentage of people who received HTR permits in KPHP Gedong Wani who own their own homes, have decent housing conditions, and state that HTR provides employment for other family members is more than 50%. Meanwhile, the percentage of people who stated that the most productive type of crop on their land is timber and who have HTR income above IDR 3,000,000 is less than 50%. The results of the community's ecological conditions show that more than 50% of HTR permit

holders in the Gedong Wani KPHP stated that they knew the types of plants, the number of plants, the age of the plants, and the planting methods they used. Meanwhile, less than 50% of the community stated that land fertility had increased, water sources had increased in quantity, water quality had improved, river quality had improved, and there had been changes in the types of crops grown on cultivated land after the HTR program was implemented. In general, the social and economic conditions of the community were quite good, while the ecological conditions of the community were still poor. There is a need for land development and utilization using complex agroforestry patterns that focus on timber crops.

Keywords: *community plantation forest, social conditions, economic conditions, ecological conditions*

**KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN EKOLOGI MASYARAKAT
PENERIMA IZIN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KPHP GEDONG
WANI**

Oleh
RAUDHIA MAGHFIRAH

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA KEHUTANAN

Pada
Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN
EKOLOGI MASYARAKAT PENERIMA
IZIN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI
KPHP GEDONG WAN**

Nama Mahasiswa

: **Raudhia Maghfirah**

Nomor Induk Mahasiswa.

: **1814151061**

Program Studi

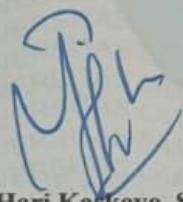
: **Kehutanan**

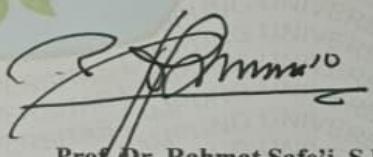
Fakultas

: **Pertanian**

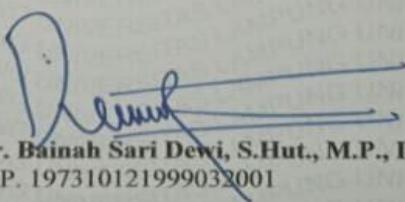
 **MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing


Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P.
NIP. 196906011998021002


Prof. Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.
NIP. 197601232006041001

2. Ketua Jurusan Kehutanan


Dr. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P., IPM.
NIP. 197310121999032001

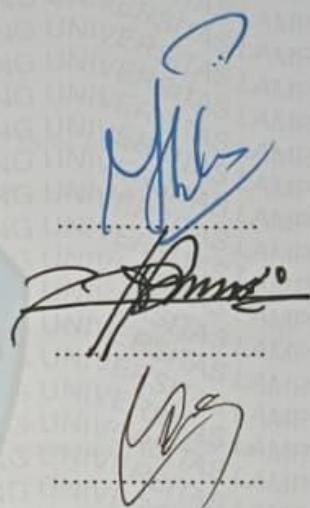
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P.**

Sekretaris : **Prof. Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.**

Anggota : **Rommy Qurniati, S.P., M.Si.**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **2 Juni 2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raudhia Maghfirah
NPM : 1814151061
Jurusan : Kehutanan
Alamat Rumah : Jalan Sribungur, Dusun Kaliayu, Desa Jatibaru,
Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung
Selatan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Kondisi Sosial Ekonomi dan Ekologi Masyarakat Penerima Izin Hutan Tanaman Rakyat di KPHP Gedong Wani”

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandarlampung, 17 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Raudhia Maghfirah
NPM. 1814151061

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Raudhia Maghfirah, lahir di Bandarlampung pada akhir tahun 2000. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 3 Jatibarу dan SMPIT Fitrah Insani Bandarlampung, serta pendidikan menengah di SMAN 10 Bandarlampung. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi di S-1 Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melakukan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Jatibarу, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan pada Februari-Maret 2021. Pada tahun yang sama di Agustus, penulis mengikuti kegiatan praktik umum (PU) selama 20 hari di Taman Nasional Way Kambas (TNWK).

SANWACANA

Segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla, Rabb semesta alam, karena berkat segala rahmat dan karunia dari-Nya penulis bisa mengusahakan skripsi yang berjudul “Kondisi Sosial Ekonomi dan Ekologi Masyarakat Penerima Izin Hutan Tanaman Rakyat di KPHP Gedong Wani” ini. Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang keterlibatan, bantuan, dukungan, dan bimbingannya sangat berarti dalam pembuatan skripsi ini:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. sebagai Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P. sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P. sebagai Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P. selaku dosen pembimbing pertama yang dengan kesabaran luasnya begitu berbaik dan berbesar hati bertahan menjadi pembimbing penulis dalam perjalanan panjang penulisan tugas akhir ini.
5. Bapak Prof. Dr. Rahmat Safe’i, S.Hut., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang dengan kesabaran luasnya telah berkenan menerima dengan lapang hati dan membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi.
6. Ibu Rommy Qurniati, S.P., M.Si. selaku dosen pembahas yang dengan kesabaran luasnya telah memberikan banyak sekali masukan, saran, dan bimbingan kepada penulis selama menempuh perjalanan panjang penyelesaian skripsi.

7. Bapak Dr. Wahyu Hidayat, S.Hut., M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik yang telah berkenan mempermudah urusan-urusan berkas perkuliahan.
8. Segenap dosen Jurusan Kehutanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Lampung.
9. Kepala beserta segenap jajaran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) KPHP Gedong Wani yang telah berkenan memberikan izin penelitian.
10. Para responden penelitian saya, segenap pengurus dan anggota Gapoktan Gemah Ripah, Jati Rukun, Karya Muda, Jaya Abadi, dan Tani Maju KPHP Gedong Wani.
11. Mamah dan Ayah, orang tua penulis. Penulis bertahan karena mereka bertahan; dengan segala bentuk curahan doa, kasih sayang, kerja keras, dukungan, motivasi, nasihat, dan ketabahan yang begitu utuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah selalu ada. Juga Kakak, Adek, Mbak, dan kedua keponakan penulis yang tanpa pamrih mendoakan, membantu, dan mendukung sampai akhir.
12. Kakek, Nenek, serta keluarga besar penulis yang selalu mendukung serta mengirimkan doa dan harapan tulusnya.
13. Teman-teman penulis; teman satu kecamatan dan KKN, teman Manusia Jurang, teman satu angkatan Kehutanan, teman WC-1, dan teman-teman lain. Terima kasih telah mengulurkan tangan dalam badi panjang ini.
14. Seluruh pihak lainnya yang turut membantu penulis dalam segala bentuknya, yang meski tidak bisa disebutkan satu per satu; tapi penulis haturkan segala syukur dan terima kasih atas keberadaan kalian semua.

Bandarlampung, 17 Juni 2025
Penulis,

Raudhia Maghfirah

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Masalah Penelitian	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Kerangka Pemikiran	3
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	5
2.1.1 Sejarah Pembentukan KPHP Gedong Wani.....	5
2.1.2 Keadaan Fisik KPHP Gedong Wani	7
2.2 Hutan Tanaman Rakyat.....	10
2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)	11
2.4 Kondisi Sosial Masyarakat	12
2.5 Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	14
2.6 Kondisi Ekologi Masyarakat.....	14
III. METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Waktu dan Tempat	16
3.2 Alat dan Objek Penelitian	17
3.3 Metode Penelitian.....	17
3.3.1 Teknik Pengambilan Sampel.....	17
3.3.2 Data dan Pengumpulan Data.....	20
3.3.3 Analisis Data	24
3.3.4 Definisi Operasional.....	26
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Pembentukan Hutan Tanaman Rakyat di KPHP Gedong Wani	32
4.2 Karakteristik Responden.....	36
4.2.1 Karakteristik Demografi.....	36

4.2.2	Karakteristik Sosial Ekonomi.....	38
4.2.3	Karakteristik Sosial Budaya.....	39
4.3	Kondisi Sosial Masyarakat Penerima Izin Hutan Tanaman Rakyat di KPHP Gedong Wani.....	41
4.4	Kondisi Ekonomi Masyarakat Penerima Izin Hutan Tanaman Rakyat di KPHP Gedong Wani.....	45
4.5	Kondisi Ekologi Masyarakat Penerima Izin Hutan Tanaman Rakyat di KPHP Gedong Wani.....	48
V.	SIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1	Simpulan	57
5.2	Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kondisi Tutupan Lahan di KPHP Gedong Wani	9
2. Jumlah Sampel Tiap Gabungan Kelompok Tani	20
3. Kebutuhan Data dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian	22
4. Matriks Metode Analisis Data.....	24
5. Definisi Operasional.....	26
6. Daftar Gapoktan Penerima IUPHHK-HTR di KPHP Gedong Wani.....	34
7. Klasifikasi Responden berdasarkan Usia	37
8. Klasifikasi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	37
9. Klasifikasi Responden berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga	38
10. Klasifikasi Responden berdasarkan Luas Lahan Garapan HTR	38
11. Klasifikasi Responden berdasarkan Status Keanggotaan.....	41
12. Pengetahuan Masyarakat mengenai Tata Batas Kawasan Hutan.....	42
13. Pertemuan Antar Anggota Kelompok Tani.....	42
14. Keterlibatan dalam Kegiatan Pendampingan Kelompok Tani	42
15. Pelatihan terkait Budidaya Penanaman atau Teknik-teknik Pertanian.....	43
16. Jaringan Sosial yang Berkelanjutan	43
17. Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.....	44
18. Keberadaan Budaya Lokal	44
19. Pengetahuan mengenai Aturan dalam HTR	44
20. Penerimaan Karet (Rp).....	45
21. Status Kepemilikan Rumah.....	46
22. Kondisi Rumah.....	46
23. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan untuk Anggota Keluarga Lain.....	47
24. Jenis Tanaman yang Paling Menghasilkan di Lahan Garapan.....	47

25. Jenis Tanaman di Lahan Garapan	48
26. Jumlah Tanaman Karet, Luasan Karet, Jumlah dan Luasan Tanaman Kayu, Luasan Total Lahan Di Areal HTR, Umur Tanaman, Kepemilikan Sawit, dan Jenis Tanaman yang Paling Menghasilkan di Lahan Garapan.....	51
27. Perubahan Jenis Tanaman Sebelum dan Sesudah HTR.....	54
28. Kesuburan Lahan.....	55
29. Kuantitas Sumber Air.....	55
30. Kualitas Air	55
31. Degradasi Sungai yang Menyebabkan Banjir	56
32. Pola Tanam yang Digunakan	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran	4
2. Peta Lokasi Penelitian	16
3. Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
4. Klasifikasi Responden berdasarkan Pekerjaan Utama	39
5. Persentase Responden yang Memiliki Pekerjaan Sampingan dan Tidak.....	40
6. Klasifikasi Responden berdasarkan Pekerjaan Sampingan.....	40

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Kebijakan pembangunan HTR berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk memberantas kemiskinan, membuat lapangan kerja baru, dan sebagaimana yang tercantum dalam agenda revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, yaitu memperbaiki kualitas pertumbuhan dengan cara mengadakan investasi proporsional antar pelaku ekonomi. Dengan kebijakan tersebut, sektor kehutanan diharapkan bisa berkontribusi pada penyejahteraan masyarakat, pemulihian lingkungan hidup, peningkatan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional (Samosir, 2015). Tujuan yang dimiliki oleh program HTR ini yaitu meningkatkan produktivitas lahan, terutama kawasan hutan yang mengalami penurunan kualitas dan tentunya bagi masyarakat akan memberikan kesempatan untuk berusaha di bidang hutan tanaman (Andrasmoro dan Nurekawati, 2017).

Sebelumnya, kawasan kerja UPTD KPHP Gedong Wani adalah areal izin Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas \pm 41.210 ha yang telah dicabut izinnya pada tahun 2007 dari penguasaan PT. Dharma Hutan Lestari (UPTD KPHP Gedong Wani, 2013). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini telah menurunkan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) kepada desa-desa di Register 40 KPHP Gedong Wani Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Desa yang telah diberikan izin tersebut yaitu Sinar Ogan, Jati Indah, Srikaton,

Jatibaru, dan Budi Lestari. Masing-masing desa yang telah mendapatkan izin memiliki Gabungan Kelompok Tani sebagai model pengelolaan, yaitu Sinar Ogan dengan Gapoktan Gemah Ripah; Jati Indah dengan Gapoktan Jati Rukun; Srikaton dengan Gapoktan Jaya Abadi; Jatibaru dengan Gapoktan Karya Muda; dan Budi Lestari dengan Gapoktan Tani Maju. Masyarakat tersebut telah mengajukan permohonan untuk IUPHHK-HTR sejak 2014 dan izin akhirnya diberikan pada Maret 2017 (Banuwa, 2018) dengan ketetapan luas wilayah sebesar 30.243 ha (Faradhana, 2019).

Penerapan program HTR bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjamin kelestarian sumber daya hutan. Melihat dari tujuan tersebut, sudah seharusnya program HTR memberikan kesempatan bagi perubahan kondisi sosial, ekologi, dan ekonomi masyarakat desa menuju lebih baik. Kajian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan kawasan yang berbasis masyarakat (Prasetyo, 2014). Penerapan Hutan Tanaman Rakyat diharapkan akan memberikan pengaruh pada peningkatan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat. Peningkatan tersebut secara berkelanjutan akan berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat, yang menjadi aspek-aspek penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran program Hutan Tanaman Rakyat terhadap kondisi sosial ekonomi dan ekologi masyarakat di KPHP Gedong Wani. Prasetyo (2009) telah melakukan penelitian sejenis yang bertujuan untuk mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Tetaf, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) atas dampak implementasi program HTR. Penelitian tersebut dilakukan di tahun 2008, yaitu setahun setelah Dokumen Siaran Pers Nomor: S.51/II/PIK-1/2007 Tanggal 21 Februari 2007 dirilis, yang menyebutkan bahwa Departemen Kehutanan saat itu telah mengalokasikan hutan produksi tidak produktif untuk usaha HTR seluas 5,4 juta ha. Dewi (2018) juga telah melakukan penelitian sejenis yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi petani HKm Kulon Progo dan kontribusi HKm terhadap pendapatan petani. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2013-2014. Pada tahun 2019, penelitian lainnya dilakukan oleh Martapani (2021) yang bertujuan

untuk mendeskripsikan program HKm dan menganalisis manfaat HKm terhadap aspek sosial ekonomi Masyarakat Peduli Gambut (MPG) Sukamaju KPHP Kayu Tangi. Penulis memutuskan melakukan penelitian di lokasi yang telah dipilih karena KPHP Gedong Wani merupakan salah satu hutan produksi di Provinsi Lampung yang masyarakatnya sudah mendapatkan IUPHHK-HTR dan merupakan HTR percontohan di Provinsi Lampung.

1.2 Masalah Penelitian

1. Bagaimana kondisi sosial masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani?
2. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani?
3. Bagaimana kondisi ekologi masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani?

1.3 Tujuan

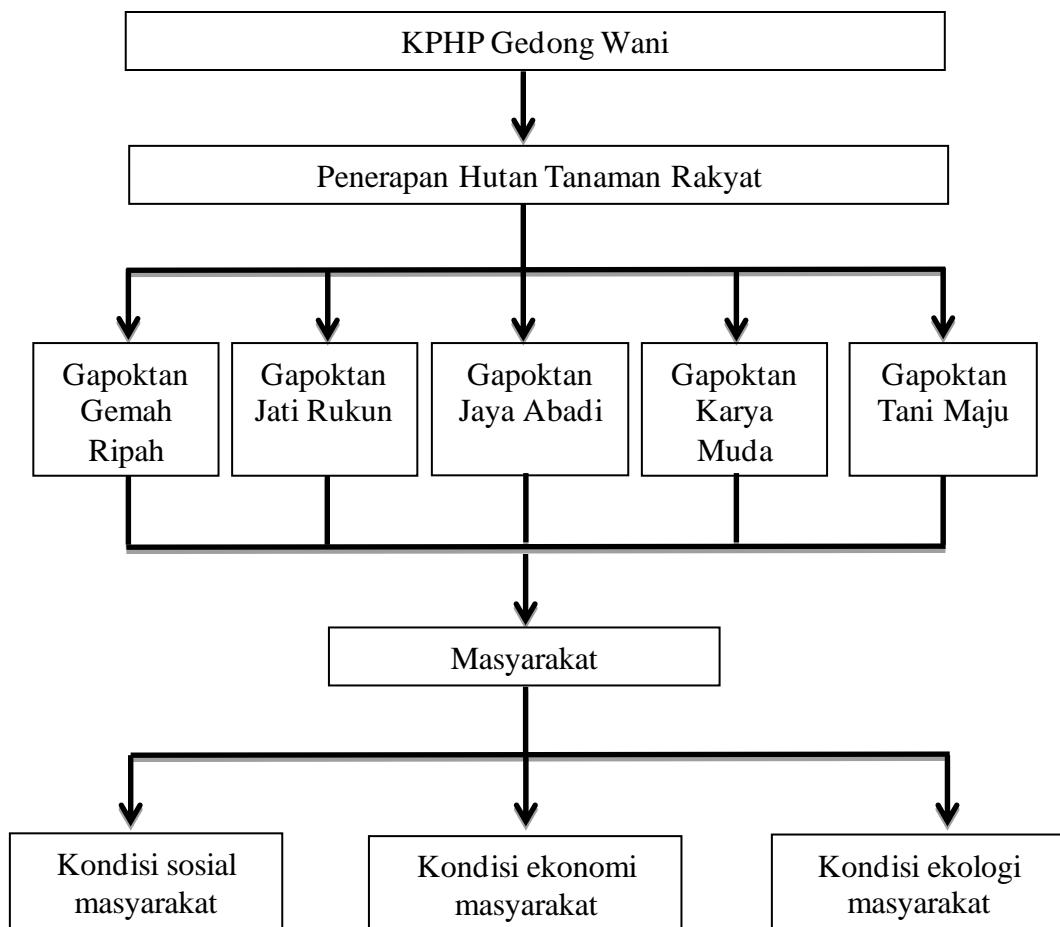
1. Mengetahui kondisi sosial masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani.
2. Mengetahui kondisi ekonomi masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani.
3. Mengetahui kondisi ekologi masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani.

1.4 Kerangka Pemikiran

Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di KPHP Gedong Wani sudah diusahakan sejak 2014 hingga akhirnya mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) pada 2017.

Implementasi program HTR di KPHP Gedong Wani tersebut dilaksanakan di 5 desa yang telah mendapat izin yaitu Sinar Ogan dengan Gapoktan Gemah Ripah, Jati Indah dengan Gapoktan Jati Rukun, Srikaton dengan Gapoktan Jaya Abadi, Jatibaru dengan Gapoktan Karya Muda, dan Budi Lestari dengan Gapoktan Tani Maju. Penerapan HTR di areal hutan produksi KPHP Gedong Wani diharapkan

dapat memiliki peran terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, sebagai salah satu aktor utama dalam pengimplementasian program HTR, diperlukan penelitian mengenai kondisi masyarakat atas adanya program ini. Dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan, nantinya akan didapatkan informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat setelah penerapan HTR. Kerangka dari penelitian yang akan dilakukan disajikan dalam bentuk diagram alir pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

2.1.1 Sejarah Pembentukan KPHP Gedong Wani

Secara geografis, karena berada di ujung pulau, Provinsi Lampung dapat diibaratkan sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera (Sholehati, 2017). Di awal abad ke-20, program transmigrasi yang pertama disusun oleh Pemerintah Belanda dengan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa yang padat (38 juta jiwa pada tahun 1930) ke Lampung (dengan populasi 300,000 jiwa pada tahun yang sama). Romli (2010) menyebutkan bahwa dalam catatan pemerintah Provinsi Lampung (2005), sejak tahun 1905 Provinsi Lampung telah didatangi oleh transmigran dari Kedu Jawa Tengah. Program tersebut masih dilanjutkan setelah kemerdekaan Indonesia sampai tahun 1980-an. (Verbist dan Pasya, 2004). Pendatang yang tiba di Lampung ada yang datang melalui jalur resmi yaitu dengan cara transmigrasi umum maupun transmigrasi spontan. Pendatang tersebut kemudian membuka lahan di kawasan hutan karena tanahnya relatif subur, termasuk di wilayah kerja UPTD KPHP Gedong Wani yang strategis karena jaraknya yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten. Mata pencaharian sebagian besar pendatang yang masuk adalah petani, dengan keterampilan yang kurang memadai. Secara bertahap para pendatang kemudian membentuk desa/kelurahan karena banyaknya jumlah dan upaya pengamanan hutan yang belum maksimal.

Areal kerja UPTD KPHP Gedong Wani telah ditunjuk sebagai kawasan hutan sejak jaman Belanda, yaitu dimulai sejak tahun 1933:

- KHP Way Ketibung I Reg. 5 ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 308 tanggal 31 Maret 1941.

- KHP Way Ketibung II Reg. 35 ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 99 tanggal 7 Februari 1933.
- KHP Way Kibang Reg. 37 ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. No. 311 tanggal 31 Maret 1941.
- KHP Gedong Wani Reg. 40 ditunjuk berdasarkan Besluit Resident Lampung District No. 372 tanggal 12 Juni 1937.

Kemudian pada tahun 1970-an, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan melalui program Hak Pengusahaan Hutan Kultur (PHHK) yang dibagikan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri kehutanan yaitu CV. Tunas, PT. Herima, PT. Lampung Pelletizing Factory, PT. Lakop, PT. Han Ni Jadico Ltd., PT. Lestari, PT. Daya Karya, PT. Mitsugoro, dan PT. Singgalaga (UPTD KPHP Gedong Wani, 2013).

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung telah mengusulkan kawasan-kawasan hutannya untuk dikelola dalam bentuk unit-unit tingkat tapak. Hal itu dimaksudkan dalam upaya untuk menekan laju degradasi hutan yang telah mencapai angka lebih 60 % di Provinsi Lampung. Usulan tersebut terdokumentasi dalam SK Nomor 68/Menhut-II/2010, yang menetapkan kawasan hutan di Provinsi Lampung terbagi menjadi 16 wilayah, dengan 9 unit KPHP dan 7 unit KPHL. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada saat itu pengelolaan 3 dari KPH yang telah dibentuk yaitu KPHP Gedong Wani, KPHP Sungai Muara Dua, dan KHPL Batu Tegi menjadi kewenangan provinsi karena berada pada lintas kabupaten (UPTD KPHP Gedong Wani, 2013).

Organisasi KPHP Gedong Wani disahkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung dengan bentuk UPTD. Kemudian setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 427/Menhut-II/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Wilayah Produksi (KPHP) Model Gedong Wani (Unit XVI), operasionalisasi KPH dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, seperti prakondisi pengelolaan hutan (pengadaan sarana/prasarana; tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan yang difasilitasi oleh BPKH II

Palembang) dan konvergensi kegiatan teknis di lokasi KPH dari UPT Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi. Areal kerja UPTD KPHP Gedong Wani sebelumnya merupakan areal izin Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT. Dharma Hutan Lestari d/h PT. Lampung Pelletizing Factory seluas ± 41.210 ha yang telah dicabut (UPTD KPHP Gedong Wani).

Hingga saat ini terdapat 39 desa definitif di wilayah kerja UPTD KPHP Gedong Wani yang sebagian atau seluruh dusunnya tercatat sebagai kawasan hutan. Selain itu, di dalam kawasan hutan KPHP Gedong Wani sudah terdapat Kantor Kecamatan, Balai Desa, Komando Rayon Militer (KORAMIL), Kantor Kepolisian Sektor (POLSEK), Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), dan sekolah dari tingkat dasar sampai menengah atas. Karena hampir seluruh kawasan telah diokupasi masyarakat, hampir seluruh wilayah kelola KPHP Gedong Wani dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat (UPTD KPHP Gedong Wani).

2.1.2 Keadaan Fisik KPHP Gedong Wani

Unit Pelaksana Teknis Daerah KPHP Gedong Wani terletak di 2 kabupaten, yaitu Lampung Selatan dan Lampung Timur yang di dalamnya terdapat 11 kecamatan dan 39 desa definitif. Berdasarkan sistem koordinat geografis, KPHP Gedong Wani terletak di $105^{\circ} 40''$ - $105^{\circ} 32' 35''$ Bujur Timur dan $05^{\circ} 10' 00''$ - $05^{\circ} 32' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah UPTD KPHP Gedong Wani mencakup 4 register Kawasan Hutan Produksi (KHP) yaitu Register 5 di KHP Way Ketibung I, Register 35 di KHP Way Ketibung II, Register 37 di KHP Way Kibang, dan Register 40 di KHP Gedong Wani. Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu DAS Way Sekampung terbentang di wilayah KPHP Gedong Wani, yang meliputi wilayah Sub DAS Ketibung, Sub DAS Kandis dan Sub DAS Sekampung Hilir (UPTD KPHP Gedong Wani, 2013).

Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor SK. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan menyatakan bahwa kawasan hutan di Provinsi Lampung memiliki luas ± 1.004.735 ha yang merupakan 30,43 % dari luas daratan di Provinsi Lampung. Rincian dari luas kawasan hutan di Provinsi Lampung tersebut yaitu Hutan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (darat dan perairan), dan Taman

Buru seluas \pm 462.030 ha; Hutan Lindung seluas \pm 317.615 ha; Hutan Produksi Tetap seluas \pm 191.732 ha; dan Hutan Produksi Terbatas seluas \pm 33.358 ha. Namun, berdasarkan hasil rekapitulasi penutupan lahan tahun 2008, \pm 66 % kawasan hutan di Provinsi Lampung yang telah disebutkan tadi sudah tidak lagi berupa hutan. Sehingga apabila dijabarkan yaitu:

1. Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (Darat dan Perairan), dan Taman Buru:
 - a. Penutupan lahan hutan seluas 236.761 ha atau 55 % dari 430.474 ha.
 - b. Penutupan lahan non hutan seluas 193.713 ha atau 45 % dari 430.474 ha.
2. Kawasan Hutan Lindung:
 - a. Penutupan lahan hutan seluas 57.171 ha atau 18 % dari 317.615 ha.
 - b. Penutupan lahan non hutan seluas 260.444 ha atau 82 % dari 317.615 ha.
3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT):
 - a. Penutupan lahan hutan seluas 6.672 ha atau 20 % dari 33.358 ha.
 - b. Penutupan lahan non hutan seluas 26.686 ha atau 80 % dari 33.358 ha.
4. Kawasan Hutan Produksi Tetap:
 - a. Penutupan lahan hutan seluas 30.677 ha atau 16 % dari 191.732 ha.
 - b. Penutupan lahan non hutan seluas 161.055 ha atau 84 % dari 191.732 ha.

Berdasarkan dari SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, wilayah kerja UPTD KPHP Gedong Wani tercatat seluas \pm 43.560,90 ha dari total luas hutan produksi di Provinsi Lampung sebesar \pm 191,732 Ha. Wilayah kerja UPTD KPHP Gedong Wani terbagi menjadi empat register, dengan KHP Way Ketibung I Register 5, KHP Way Ketibung II Register 35, dan KHP Gedong Wani Register 40 berada di Lampung Selatan sedangkan KHP Way Kibang Register 37 dan KHP Gedong Wani Register 40 sisanya berada di Lampung Timur. Luas yang dimiliki masing-masing register yaitu Register 5 seluas \pm 1.922,90 ha, Register 35 seluas \pm 3.800,00 ha, Register 40 Lampung Selatan seluas \pm 25.563,00 ha, Register 37 seluas \pm 6.638,00 ha, dan Register 40 Lampung Timur seluas \pm 6.637,00 ha. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 68/Menhut-II/2010 tanggal 28 Januari 2010 dan SK 427/Menhut-II/ 2011 tanggal 27 Juli 2011, luas wilayah KPHP Gedong Wani yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur

adalah seluas \pm 30.243 Ha. Dengan adanya perbedaan seluas 13.317,90 ha dari kedua peraturan tersebut, dibutuhkan pengukuran ulang khususnya untuk wilayah UPTD KPHP Gedong Wani sehingga keakuratan data tentang luas areal baik untuk pembagian blok, petak maupun anak petak dapat lebih terjamin (UPTD KPHP Gedong Wani, 2013).

Jenis tanah di wilayah KPHP Gedong Wani umumnya merupakan tanah yang berstruktur fisik pejal, tidak gembur, masam dengan kapasitas tukar kation (KTK) rendah (UPTD KPHP Gedong Wani, 2013). Penutupan lahan di wilayah kerja KPHP Gedong Wani yang telah dominasi oleh desa masyarakat terdiri dari Pertanian Lahan Kering (Pt), Pemukiman (Pm), Lahan Terbuka (T), Belukar (B), Perkebunan (Pk), dan Pabrik. Data ini didapatkan dari interpretasi Peta Citra Landsat 7 ETM+ Path/Row 123/064 liputan tanggal 26 April 2010 (UPTD KPHP Gedong Wani, 2013). Tabel 5 menunjukkan bahwa tutupan lahan untuk pertanian lahan kering adalah terluas yaitu 21.267 ha (70,6%). Sementara itu tutupan lahan untuk pertanian lahan campuran tanaman kayu, perkebunan dan buah-buahan seluas 3.865 ha (12,8%), untuk pemukiman 2.287 ha (7,6%), dan lahan terbuka 2.024 ha (6,7%). Merujuk dari kondisi tersebut, pengelolaan unit KPHP Gedong Wani perlu melibatkan beberapa sektor.

Tabel 1. Kondisi Tutupan Lahan di KPHP Gedong Wani

No.	Penutupan Lahan	Luas	
		(ha)	(%)
1.	Belukar	308	1,02
2.	Perkebunan	275	0,91
3.	Pertanian lahan kering	21.267	70,6
4.	Pertanian lahan campuran	3.865	12,8
5.	Lahan terbuka	2.024	6,72
6.	Pemukiman	2.287	7,60
7.	Pabrik	85	0,28
Jumlah		30.111	100

Sumber: Dinas Kehutanan Lampung (2012) dalam Sylviani dan Hakim (2014).

2.2 Hutan Tanaman Rakyat

Program HTR dapat dijadikan sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang nantinya akan berperan dalam meningkatkan pendapatan petani, memanfaatkan secara maksimal dan lestari lahan-lahan yang tidak produktif, menghasilkan kayu bakar, menghasilkan kayu bahan bangunan maupun bahan baku industri, mempercepat usaha rehabilitasi lahan, menghasilkan buah-buahan, umbi-umbian, bahan obat-obatan, sayuran dan pakan ternak (Surachman, 2014). Dengan adanya pengelolaan HTR, peningkatan pembangunan hutan di Indonesia diharapkan akan berkelanjutan. Karena HTR ini sangat penting, diperlukan konsep yang matang tentang HTR agar masyarakat dapat berkomitmen dan melaksanakan dengan mudah di lapangan.

Implementasi program pembangunan hutan tanaman rakyat (HTR) berasal dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Seperti yang telah dinyatakan dalam PP No. 6 Tahun 2007, kawasan hutan negara yang bisa memperoleh izin pemanfaatan HTR adalah yang memiliki fungsi sebagai hutan produksi secara hukum (Prasetyo, 2009). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat dilakukan pada HTI (hutan tanaman industri), HTR (hutan tanaman rakyat), dan HTHR (hutan tanaman hasil reboisasi).

Masyarakat diberikan akses untuk melakukan pengelolaan hutan produksi secara legal dengan dikeluarkannya kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Kebijakan ini lahir ketika kebijakan sejenis tidak juga sukses dalam penerapannya, baik kebijakan yang menyangkut pemberdayaan masyarakat maupun pemanfaatan hutan produksi. Dalam rangka pemanfaatan hutan produksi, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain kebijakan pemberian hak pengusahaan hutan (HPH) dan pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Masing-masing kebijakan tersebut yang dinilai gagal dalam mempertahankan kelestarian hutan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan kayu.

Ketidakberhasilan juga terjadi pada kebijakan pemberdayaan yang seharusnya mampu memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan (Febriani, 2012).

2.3 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, salah satu jenis hutan menurut fungsinya adalah hutan produksi. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi utama untuk kepentingan produksi hasil hutan yang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang maksimal, tetapi tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan keberadaan kawasan hutan produksi itu sendiri (Ekawati, 2013). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, hutan produksi adalah kawasan hutan yang fungsi pokoknya adalah memproduksi hasil hutan. Kegiatan pemanfaatan hutan yang dapat dilakukan di hutan produksi yaitu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); pemungutan hasil hutan kayu, dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan menyatakan tipe hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan

untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi juga menyatakan definisi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan yang luas wilayah seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi. KPHP merupakan wujud dari pembentukan wilayah pengelolaan hutan produksi yang dilaksanakan pada level unit pengelolaan. Merujuk pada lima tugas dan fungsi KPHP yang terdapat di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Hutan Produksi (KPHP), kelompok aktivitas pengelolaan utama yang harus dikerjakan oleh KPHP dapat diringkas menjadi:

- a. Kelola Kawasan, terdiri dari aktivitas penyelenggaraan pengelolaan potensi wilayah, pengelolaan kewilayahan, dan monitoring/evaluasi/pengendalian/penilaian terhadap aktivitas pengelolaan hutan.
- b. Kelola Kelembagaan, terdiri dari aktivitas pengelolaan organisasi KPH dan penjabaran kebijakan kehutanan nasional/provinsi/kabupaten/kota.
- c. Kelola Usaha adalah kelompok aktivitas yang dilakukan untuk mencapai kemandirian KPH, dengan cara menarik masuk sumberdaya di luar KPH untuk mencapai tujuan pengelolaan KPH (Raharjo dan Ulifah, 2014).

2.4 Kondisi Sosial Masyarakat

Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan mustahil tercapai apabila paradigma kehutanan yang lama masih dijadikan acuan. Paradigma kehutanan yang lama tersebut adalah pengusahaan hutan hanya memberikan keuntungan yang besar bagi pengusaha, tidak dapat mengangkat ekonomi masyarakat dan daerah serta memiliki dampak lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu diperlukan perubahan paradigma secara mendasar yaitu pergeseran orientasi dari pengelolaan kayu menjadi pengelolaan sumber daya pengelolaan sentralistik menjadi desentralistik, serta pengelolaan hutan di masa

depan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan. Adanya paradigma baru dalam pengelolaan hutan diharapkan dapat menjaga dan mempertahankan kelestarian hutan dan tentunya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah khususnya perolehan sumber Pendapatan Asli Daerah (Sanjaya, 2020).

Kondisi sosial ekonomi desa hutan berpengaruh terhadap hutan mulai dari aspek kehidupan masyarakat, ketergantungan pada ekonomi, areal perladangan dan perkebunan, kawasan buru untuk kebutuhan protein, bahan bangunan, serta berbagai fungsi yang berhubungan dengan kehidupan di masyarakat (Prasojo, 2021); Simon (2001). Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa hutan harus dirancang dengan baik untuk merumuskan tujuan dalam pengelolaan hutan. Pemecahan masalah sosial dalam suatu desa hutan perlu adanya pemahaman dengan nilai-nilai di masyarakat serta partisipasi dari kelompok masyarakat sebagai kunci dalam membuat perumusan tentang pengelolaan hutan. Menurut (Damanik dan Purba, 2019); Simon (2001) keberhasilan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan ditentukan oleh keberhasilan menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat. Gagal memecahkan masalah sosial masyarakat, maka hutannya juga akan gagal.

Menurut Fatahyah (2018); Watung (2013); Singarimbun (1987) karakteristik sosial masyarakat meliputi tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, status sosial, tingkat kesehatan, dan umur. Kondisi sosial dari masyarakat sekitar hutan dapat diamati perbedaannya dari sebelum adanya suatu program perhutanan sosial dan sesudah adanya program. Program perhutanan sosial yang diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap kondisi sosial masyarakat salah satunya adalah hutan tanaman rakyat.

2.5 Kondisi Ekonomi Masyarakat

Berbagai bidang kehidupan seperti dependensi ekonomi, areal perladangan dan perkebunan, kawasan buru untuk memenuhi protein, bahan bangunan, dan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan kelembagaan sosial tradisional pada masyarakat merupakan pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat desa hutan terhadap hutannya. Dalam merumuskan tujuan pengelolaan hutan, Simon (2001) menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan adalah faktor yang perlu dipertimbangkan.

Karakteristik sosial ekonomi budaya memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan hutan (Subaktini, 2002). Oleh karena itu, untuk memahami kompleksitas dari pengaruh keberadaan masyarakat terhadap kualitas hutan, perlu didapatkan pemahaman mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar hutan. Mengkaji kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar hutan adalah hal yang perlu dilakukan untuk memperoleh penjelasan tentang hubungan dan pengaruh presensi hutan serta fungsinya terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kajian tersebut juga nantinya akan bermanfaat untuk memanifestasikan rencana atau evaluasi kegiatan pengelolaan hutan (Senoaji, 2011).

Intensitas penggunaan lahan oleh seorang petani sekitar hutan dapat dilihat dari luas lahan garapan yang dikuasai serta pola jenis penggunaan lahan, di antaranya adalah budidaya pertanian intensif (sawah, holtikultura), budidaya pertanian ekstensif (kopi monokultur, singkong) dan budidaya pertanian wanatani (kopi multistrata, kebun campuran) (Pasha dan Susanto, 2009). Apabila kondisi ekonomi masyarakat ditelaah lebih jauh, dapat diketahui pula sejauh mana hubungan antara pola penggunaan lahan di dalam kawasan hutan dengan karakteristik kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sendiri.

2.6 Kondisi Ekologi Masyarakat

Menurut Dharmawan (2007); Diesendorf dan Hamilton (1997) ekologi manusia ditafsirkan sebagai bagian dari ilmu yang meninjau hubungan antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan Micklin dan Poston (1998) menafsirkan ekologi manusia menjadi lebih tendensius, dengan tidak

menyamakannya dengan bio-ekologi secara umum, yaitu ekologi manusia adalah bidang studi yang didasarkan pada empat konstruk referensial yaitu populasi, teknologi, organisasi, dan lingkungan.

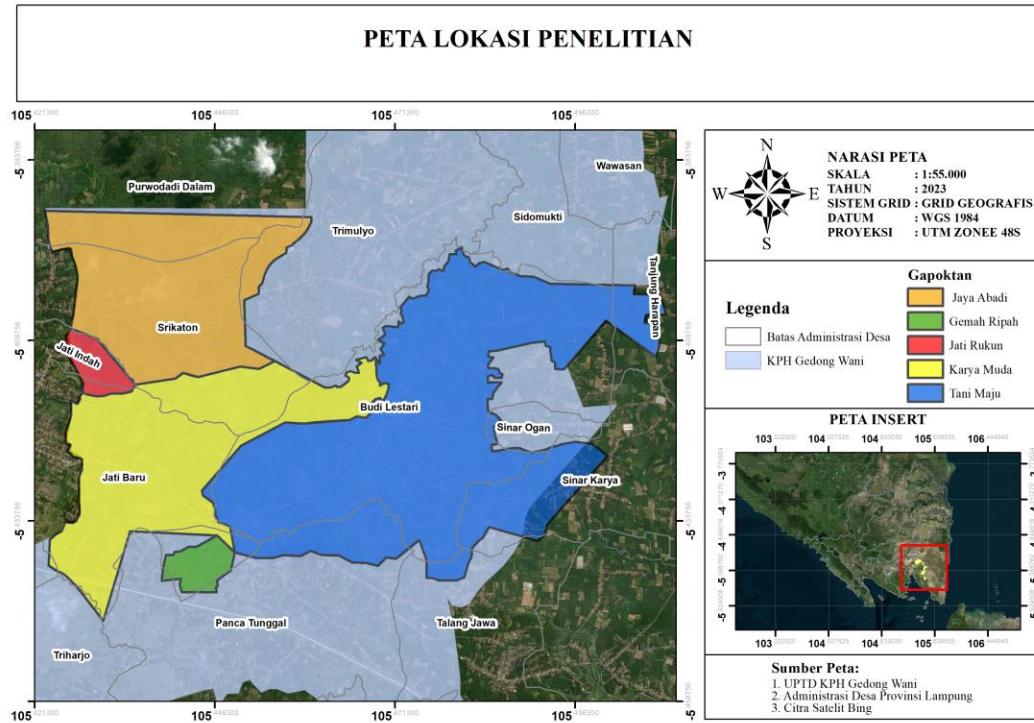
Konsep kesetimbangan POET (*population, organization, environment, and technology*) diciptakan secara lebih lanjut dari penafsiran Micklin dan Poston (1998) tersebut. Berdasarkan pustaka ekologi manusia kontemporer, bidang ilmu ini sangat kuat berkepentingan terhadap permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan-sandang-papan dan nafkah manusia. Di dalamnya ekologi manusia dipahami sebagai hal yang berkaitan dengan aspek organisasi dari populasi manusia yang muncul dari aktivitas manusia yang produktif secara berkelanjutan. Sementara itu, permasalahan ekologi manusia kontemporer bergelut pula pada bagaimana organisasi sumberdaya alam dirumuskan dengan seperangkat norma-nilai dan tata-aturan, yang berujung pada ekologi manusia ditafsirkan sebagai ilmu yang membahas tanah, air, dan udara. Dengan kata lain ilmu tentang organisasi sumberdaya alam (Dharmawan, 2007).

Masyarakat lokal seputar hutan selama ini sangat diharapkan sebagai salah satu agen penjaga utama dalam hal biodiversitas dan konservasi hutan, oleh karena itu kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan menjadi masalah penting yang perlu dipahami dinamikanya. Pemahaman aspek psikologis sosial dalam perilaku konservasi masyarakat lokal, khususnya yang hidup berdampingan dengan kawasan hutan perlu untuk dipelajari. Di beberapa masyarakat sekitar hutan Indonesia, nilai hutan sudah didasarkan atas fungsi hutan dalam menjaga kualitas hidup masyarakat dalam bertahan hidup, keberlanjutan tersedianya sumber daya, dan fungsi sosial dan spiritual sehingga bukan nilai ekonomis semata atau nilai keuntungan finansial saja. Hutan tidak dianggap sebagai komoditas saja tapi menjadi bagian siklus hidup masyarakat hutan (Rahmawati, 2016).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di KPH Gedong Wani Register 40, tepatnya di areal kerja kelompok HTR di Desa Budi Lestari, Sinar Ogan, Jatibaru, Srikaton, dan Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi dilakukan karena Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari masing-masing desa tersebut adalah keseluruhan yang sudah menerima IUPHK-HTR sejak 2017. Penelitian dilakukan pada Juli-September 2023. Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

3.2 Alat dan Objek Penelitian

Alat yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah kuesioner sebagai panduan wawancara, kamera dan *recorder* untuk pendokumentasian, alat tulis untuk mencatat hasil wawancara, serta laptop untuk menyusun dan mengolah data. Objek penelitian ini adalah petani hutan yang tergabung dalam Gapoktan Gemah Ripah di Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang, Gapoktan Jati Rukun di Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang, Gapoktan Jaya Abadi di Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang, Gapoktan Karya Muda di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang, dan Gapoktan Tani Maju di Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan pendekatan *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel *simple random sampling*. *Simple random sampling* merupakan prosedur pengambilan sampel sederhana yang dilakukan secara adil karena setiap unit mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat terpilih (Sumargo, 2020). Sampel dalam penelitian ini adalah anggota kelompok tani hutan (KTH) yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang sudah mendapatkan IUPHHK-HTR di KPHP Gedong Wani Register 40.

Gapoktan tersebut yaitu Gapoktan Gemah Ripah dengan anggota 190 orang, Gapoktan Jati Rukun dengan anggota 190 orang, Gapoktan Jaya Abadi dengan anggota 809 orang, Gapoktan Karya Muda dengan anggota 697 orang, dan Gapoktan Tani Maju dengan anggota 2.658 orang. Total jumlah anggota populasi untuk 5 Gapoktan tersebut adalah 4.544 orang. Penentuan jumlah sampel untuk 5 Gapoktan dihitung dengan menggunakan Rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{n}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah responden

N = Jumlah seluruh gapoktan

e = Presisi 15 %. Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan

pengambilan sampel yang dapat ditolerir yaitu sebesar 15%. Pemilihan presisi 15% karena populasi lebih dari 100 (Arikunto, 2011).

1 = Konstanta

Penentuan jumlah responden tiap Gapoktan di KPHP Gedong Wani:

$$n = \frac{4544}{1 + 4544 (0,15)^2}$$

$$n = \frac{4544}{1 + 102,24}$$

$$n = \frac{4544}{103,24}$$

$$n = 44,013$$

$$n = 44 \text{ responden}$$

Setelah menentukan total sampel dengan menggunakan Rumus Slovin, penentuan jumlah sampel di setiap Gapoktan dilakukan secara *proportional random sampling* karena mempertimbangkan jumlah sub populasi tiap Gapoktan yang tidak sama. Sekaran (2006) dalam Sunuharjo dan Ruhana (2016) menyebutkan *proportional random sampling* adalah teknik pengambilan secara acak dengan jumlah yang proporsional untuk setiap sub populasi sesuai dengan ukuran populasinya. Berikut rumus *proportional random sampling*:

$$ni = \frac{Ni}{N} \cdot n$$

ni = Jumlah sampel menurut stratum

N = Jumlah seluruh anggota gapoktan

Ni. = Jumlah sampel per gapoktan

n. = Jumlah sampel seluruhnya

Jumlah pengambilan sampel tiap Gapoktan yang dilakukan di KPHP Gedong Wani.

1. Gapoktan Gemah Ripah (Desa Sinar Ogan)

$$ni = \frac{190}{4544} \cdot 44$$

$$ni = \frac{8360}{4544}$$

$$ni = 1,839$$

$$ni = 2 \text{ responden}$$

2. Gapoktan Jati Rukun (Desa Jati Indah)

$$ni = \frac{190}{4544} \cdot 44$$

$$ni = \frac{8360}{4544}$$

$$ni = 1,839$$

$$ni = 2 \text{ responden}$$

3. Gapoktan Karya Muda (Desa Jatibaru)

$$ni = \frac{697}{4544} \cdot 44$$

$$ni = \frac{30668}{4544}$$

$$ni = 6,749$$

$$ni = 7 \text{ responden}$$

4. Gapoktan Jaya Abadi (Desa Srikaton)

$$ni = \frac{809}{4544} \cdot 44$$

$$ni = \frac{35596}{4544}$$

$$ni = 7,833$$

$$ni = 8 \text{ responden}$$

5. Gapoktan Tani Maju (Desa Budi Lestari)

$$ni = \frac{2658}{4544} \cdot 44$$

$$ni = \frac{116952}{4544}$$

$$ni = 25,737$$

$$ni = 25 \text{ responden}$$

Tabel 2. Jumlah Sampel Tiap Gabungan Kelompok Tani

Desa	Gabungan Kelompok Tani	Populasi	Sampel
Sinar Ogan	Gemah Ripah	190	5
Jati Indah	Jati Rukun	190	5
Jatibaru	Karya Muda	697	7
Srikaton	Jaya Abadi	809	8
Budi Lestari	Tani Maju	2658	25
	Jumlah	4544	50

Berdasarkan perhitungan awal yang dilakukan, batas minimal banyaknya responden dari 5 Gapoktan adalah 44 orang. Setelah dilakukan perhitungan secara *proportional random sampling*, sampel yang diambil dari masing-masing sub populasi yaitu Gapoktan Gemah Ripah sebanyak 2 responden, Jati Rukun sebanyak 2 responden, Karya Muda sebanyak 7 responden, Jaya Abadi sebanyak 8 responden, dan Tani Maju sebanyak 25 responden. Kemudian sampel dari Gapoktan Gemah Ripah dan Jati Rukun dibulatkan menjadi 5 responden sehingga total sampel menjadi 50 responden. Pembulatan hasil perhitungan jumlah responden gapoktan dilakukan ke atas dengan pertimbangan supaya sampel dapat lebih mewakili populasi.

3.3.2 Data dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran penelitian (In dan Asyik, 2019). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara berstruktur dengan menggunakan kuesioner yang ditanyakan kepada responden, wawancara mendalam kepada informan, dan observasi langsung di lapangan. Pengisian kuesioner diikuti oleh wawancara lanjutan secara lebih mendalam

dengan tujuan melengkapi informasi dan memperkuat argumen dari data (Fazayanti, 2019). Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Karakteristik responden yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, status keanggotaan dan luas lahan garapan.
- b. Kondisi sosial masyarakat yang meliputi pengetahuan tentang tata batas kawasan, kelembagaan (pertemuan antar anggota kelompok tani dan keterlibatan dalam pendampingan kelompok tani), pelatihan budidaya dan teknologi, jaringan sosial, budaya lokal, dan pemanfaatan sumberdaya hutan (transparansi dalam pemanfaatan dan pengetahuan mengenai aturan HTR).
- c. Kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat kesejahteraan masyarakat (penerimaan HTR, status kepemilikan rumah, dan kondisi rumah), pengetahuan teknologi dan budidaya (jenis tanaman paling menghasilkan di lahan garapan), dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
- d. Kondisi ekologi masyarakat yang meliputi biologi lingkungan (jenis tanaman, perubahan jenis tanaman di lahan garapan, jumlah tanaman, dan usia tanaman), fisik lingkungan (kesuburan lahan, kuantitas sumber air, kualitas air, kualitas sungai), dan cara penanaman.

Data sekunder adalah data dan informasi yang diperoleh dari hasil pencatatan terhadap data-data yang sudah tersedia (Samosir, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan melakukan pengolahan literatur yang terkait dengan penelitian. Data tersebut berasal dari instansi terkait, laporan penelitian, karya ilmiah, dokumentasi maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan berupa gambaran umum wilayah penelitian meliputi keadaan fisik wilayah (letak dan luas), informasi lainnya yang mendukung penelitian seperti data jumlah anggota gabungan kelompok tani dan sejarah pembentukan KPHP, serta bahan pustaka yang menjadi landasan teori (Ilfa, 2020).

Tabel 3. Kebutuhan Data dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian

No.	Kebutuhan Data	Data yang Dikumpulkan	Sumber Data	Teknik Pengambilan Data
1.	Gambaran umum lokasi penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Keadaan fisik wilayah (letak dan luas) <input type="radio"/> Sejarah pembentukan KPHP Gedong Wani <input type="radio"/> Jumlah anggota gabungan kelompok tani 	Data KPHP Gedong Wani, buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan lapangan	Studi literatur dan observasi
2.	Karakteristik responden	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Jenis kelamin <input type="radio"/> Usia <input type="radio"/> Tingkat pendidikan <input type="radio"/> Jumlah anggota keluarga <input type="radio"/> Pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan <input type="radio"/> Status keanggotaan <input type="radio"/> Luas lahan garapan 	Responden	Kuesioner
3.	Kondisi sosial petani HTR KPHP Gedong Wani	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Pengetahuan tentang tata batas kawasan <input type="radio"/> Kelembagaan <input type="radio"/> Pelatihan budidaya dan teknologi <input type="radio"/> Jaringan sosial <input type="radio"/> Budaya lokal <input type="radio"/> Pemanfaatan sumberdaya hutan 	Responden dan informan	Kuesioner dan wawancara mendalam
4.	Kondisi ekonomi petani HTR KPHP Gedong Wani	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Tingkat kesejahteraan masyarakat <input type="radio"/> Pengetahuan budidaya dan teknologi <input type="radio"/> Ketersediaan lapangan 	Responden dan informan	Kuesioner dan wawancara mendalam

pekerjaan				
5.	Kondisi ekologi petani HTR KPHP Gedong Wani	<input type="radio"/> Biologi lingkungan <input type="radio"/> Fisik lingkungan <input type="radio"/> Cara penanaman	Responden dan informan	Kuesioner dan wawancara mendalam

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang didukung oleh pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya menggunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik. Sebaliknya pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, *interview* mendalam, analisis isi, *snowball* dan *story* (Musianto, 2002).

Secara pendekatan kuantitatif, metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu metode survei dengan wawancara terstruktur menggunakan instrumen kuesioner. Metode survei merupakan metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini. Secara pendekatan kualitatif, metode yang dilakukan adalah wawancara mendalam terhadap narasumber kunci, observasi lapangan, dan pengolahan literatur yang terkait dengan penelitian.

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tergabung sebagai anggota KTH di 5 Gapoktan KPHP Gedong Wani. Penentuan responden dilakukan secara *random* dengan karakteristik umum yang sama yaitu berprofesi sebagai petani hutan di KPHP Gedong Wani dan menggarap lahan di kawasan. Adapun penentuan informan dalam wawancara mendalam dilakukan secara sengaja dengan memilih responden yang dapat menjawab pertanyaan kuesioner secara lebih mendetail. Informan-informan yang terpilih dianggap memiliki pengetahuan lebih terkait pelaksanaan program HTR karena mampu memberikan penjelasan lebih jauh. Ini sejalan dengan definisi menurut Agusta (2003) yakni responden adalah sumber data yang di dalamnya mencakup keragaman gejala-gejala, berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif, dan

persepsi. Sedangkan informan adalah sumber data yang bersinggungan dengan pihak ketiga dan mencakup data tentang hal-hal yang melembaga atau gejala umum. Apabila tambahan informan tidak lagi menghasilkan pengetahuan baru maka penggalian informasi dihentikan karena data sudah berada pada titik jenuh (Lathifah dan Lubis, 2018).

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, meliputi pengamatan terhadap kondisi aktual di lapangan yang terdiri dari pengamatan terhadap kondisi biofisik hutan produksi yang telah dibangun untuk hutan tanaman rakyat di wilayah KPHP Gedong Wani register 40 di 5 desa lokasi penelitian, membandingkan hasil wawancara dengan kenyataan yang ada di lapangan, dan pengamatan terhadap peran HTR terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan ekologi masyarakat.

3.3.3 Analisis Data

Analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif dilakukan terhadap data primer yang diambil dari kuesioner. Pengolahan data dilakukan menggunakan *Microsoft Excel*. Penyajian data statistik tersebut dilakukan dengan membuat diagram dan tabel distribusi frekuensi. Menurut Rahma (2017); Sugiyono (2009) metode statistik deskriptif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Berikut matriks keterkaitan antara tujuan penelitian, sumber data, dan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 4. Matriks Metode Analisis Data

No.	Tujuan Penelitian	Sumber Data	Metode Analisis
1.	Mengetahui kondisi sosial masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani	Data primer	Analisis deskriptif
2.	Mengetahui kondisi ekonomi masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani	Data primer	Analisis deskriptif
3.	Mengetahui kondisi ekologi masyarakat	Data primer	Analisis deskriptif

penerima izin HTR di
KPHP Gedong Wani

Analisis data adalah proses penyusunan data ke dalam pola, kategori, dan satu pemaparan dasar (Rachman, 2022). Analisis kualitatif adalah analisis yang dimaksudkan untuk mendukung dan mempertegas hasil perhitungan secara kuantitatif yang digambarkan dengan kalimat untuk memperoleh kesimpulan (Lambajang, 2013). Analisis kualitatif dilakukan terhadap data pendukung yang mencakup hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil analisis kualitatif yang berbentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka ini kemudian disajikan secara deskriptif naratif untuk menambahkan kelengkapan data yang didapatkan secara statistik.

Metode triangulasi digunakan dalam pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan data yang diperoleh melalui kuesioner dengan data hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan (Sugiyono, 2014). Teknik triangulasi tidak hanya dipahami sebagai salah satu teknik analisis data dan teknik validasi data kualitatif, tetapi dapat juga dipahami sebagai suatu teknik penelitian perpaduan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif (Nurfajriani, 2024). Gabungan data yang diperoleh kemudian diolah, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk teks naratif, matriks, atau bagan.

Analisis kualitatif meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Milles dan Huberman, 2014). Proses reduksi data terdiri dari perangkuman, pemilahan hal-hal pokok, penyederhanaan, pemfokusan pada hal penting, hingga perubahan bentuk data hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Reduksi data bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Selanjutnya proses penyajian data yang berupa penyusunan informasi dan data yang didapatkan menjadi pemaparan singkat yang mudah dibaca dalam bentuk kutipan langsung dan tidak langsung untuk menguatkan data kuantitatif yang diperoleh. Terakhir yaitu proses verifikasi yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi. Kesimpulan yang diperoleh awalnya bersifat sementara, akan tetapi dengan bertambahnya data dan

diperolehnya keseluruhan data hasil penelitian maka kesimpulan akhir akan didapatkan.

3.3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pemaparan tentang batasan variabel penelitian atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Definisi operasional juga bermanfaat untuk mengarahkan kepada pengukuran atau pengamatan terhadap variabel-variabel yang bersangkutan serta pengembangan instrumen. Penelitian ini menggunakan variabel yang terbagi menjadi beberapa indikator. Masing-masing variabel dan indikator terlebih dahulu diberi batasan sehingga dapat ditentukan skala pengukurannya. Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5. Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala pengukuran data
1.	Karakteristik responden	Karakteristik responden merupakan gambaran umum yang terdiri dari data-data tentang responden yang didapatkan dari penelitian yang telah dilaksanakan.		
	Jenis kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak lahir.	➤ Laki-laki ➤ Perempuan	Nominal
	Usia	Lama hidup responden sejak lahir sampai menjadi responden, dinyatakan dalam satuan tahun.	➤ 30-45 ➤ 46-60 ➤ 61-75	Rasio
	Tingkat pendidikan	Tahapan pendidikan terakhir yang ditempuh responden.	➤ Tidak sekolah ➤ SD ➤ SMP ➤ SMA	Ordinal
	Jumlah anggota keluarga	Jumlah tanggungan responden ditambah dengan dirinya sendiri.	➤ 2 ➤ 3 ➤ 4 ➤ 5	Rasio

Pekerjaan	Pekerjaan utama dan sampingan responden.	➤ 6	Nominal
		➤ 7	
		➤ Pekerjaan Utama	
		➤ Petani	
		➤ Wiraswasta	
		➤ Buruh	
		➤ Perangkat desa	
		Pekerjaan sampingan	
		➤ Petani	
		➤ Peternak	
		➤ Wiraswasta	
		➤ Buruh	
		➤ Perangkat desa	
Status keanggotaan	Status responden dalam kelompok tani/gapoktan.	➤ Pengurus ➤ Anggota	Nominal
Luas lahan garapan	Luas ladang garapan yang ada di dalam kawasan HTR KPHP Gedong Wani (m ²)	➤ 0-12.500 ➤ 12.501-25.000 ➤ 25.001-37.500 ➤ 37.501-50.000 ➤ >50.000	Rasio
2. Kondisi sosial petani HTR KPHP Gedong Wani	Suatu keadaan yang berkaitan dengan situasi dalam masyarakat tertentu yang mempengaruhi keadaan sosial masyarakat tersebut. Masyarakat dalam penelitian ini adalah petani HTR KPHP Gedong Wani.		
Pengetahuan tentang tata batas kawasan	Pengetahuan responden tentang wilayah desa yang masih masuk ke dalam kawasan hutan yang diukur dari tahu atau tidaknya responden terhadap tata batas yang sudah ditetapkan.	Pengetahuan masyarakat mengenai tata batas kawasan KPHP Gedong Wani di desa masing-masing ➤ Ya/mengetahui, skor 2 ➤ Tidak/Tidak mengetahui, skor 1	Ordinal
Kelembagaan	Kegiatan petani HTR dalam suatu lembaga yang mewadahi masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan hutan,	Pertemuan antar anggota tani: ➤ Ya/mengikuti, skor 2 ➤ Tidak/tidak mengikuti, skor 1	Ordinal

	diukur melalui pertemuan antar anggota kelompok tani dan keterlibatan dalam pendampingan kelompok tani.	1	
		Keterlibatan dalam pendampingan kelompok tani: ➤ Ya/pernah, skor 2 ➤ Tidak/tidak pernah, skor 1	Ordinal
Pelatihan budidaya dan teknologi	Peningkatan kapasitas dan pendampingan petani HTR dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, diukur melalui pernah atau tidaknya responden mengikuti pelatihan yang diinisiasi pihak-pihak seperti KPH/Dinas Kehutanan/pemerintah /swasta/LSM.	Pelatihan yang diinisiasi pihak-pihak seperti KPH/Dinas Kehutanan/pemerintah/swasta/LSM: ➤ Ya/pernah, skor 2 ➤ Tidak/tidak pernah, skor 1	Ordinal
Jaringan sosial	Kerja sama/hubungan sosial berkelanjutan yang dijalin responden dengan pihak-pihak seperti KPH/KTH lain/LSM/swasta/Perusahaan.	Kerja sama/hubungan sosial berkelanjutan: ➤ Ya/ada, skor 2 ➤ Tidak/tidak ada, skor 1	Ordinal
Budaya lokal	Budaya yang dimiliki oleh suatu wilayah dan mencerminkan keadaan sosial di wilayahnya, diukur melalui masih ada atau tidaknya budaya lokal di areal HTR KPHP Gedong Wani.	Keberadaan budaya lokal dan hukum adat yang masih diberlakukan ➤ Ya/ada ➤ Tidak/tidak ada	Ordinal
Pemanfaatan sumberdaya hutan	Kegiatan pemanfaatan semua produk dari hutan dan nilainya dalam kaitannya dengan manfaatnya bagi manusia, diukur melalui sembunyi-sembunyi atau	Transparansi pemanfaatan sumberdaya hutan: ➤ Tidak/tidak sembunyi-sembunyi, skor 2 ➤ Ya/sembunyi-sembunyi, skor	Ordinal

	tidaknya responden dalam pemanfaatan SDH dan tahu atau tidaknya responden terhadap minimal 3 buah aturan HTR.	1	
		Pengetahuan mengenai minimal 3 buah aturan dalam HTR: ➤ Tidak tahu ➤ Tahu 1 aturan ➤ Tahu 2 aturan ➤ Tahu 3 aturan	Ordinal
3.	Kondisi ekonomi petani HTR KPHP Gedong Wani	Kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan. Masyarakat dalam penelitian ini adalah petani HTR KPHP Gedong Wani.	
	Tingkat kesejahteraan masyarakat	Suatu konsep yang ditentukan oleh banyak indikator yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. Dalam penelitian ini diukur	Penerimaan Karet (Rp) ➤ 0 ➤ < 3.000.000 ➤ 3.000.001- 6.000.000 ➤ 6.000.001- 9.000.000 ➤ 9.000.001- 12.000.000 ➤ 12.000.001- 15.000.000 ➤ 15.000.001- 18.000.000

	melalui penerimaan HTR, status kepemilikan rumah, dan kondisi rumah.	Status kepemilikan rumah: ➤ Milik sendiri ➤ Sewa ➤ Menumpang	Ordinal
		Kondisi rumah: ➤ Fisik bangunan Beton Bata Kayu Rumbia Tembok berplester ➤ Jenis lantai Keramik Tanah Ubin Semen Bambu Kayu ➤ Jenis atap Genteng Beton cor Asbes Seng	Ordinal
	Pengetahuan teknologi dan budidaya	Pengetahuan yang dimiliki petani HTR dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yang diukur melalui pengetahuan responden mengenai jenis tanaman paling menghasilkan di lahan garapan.	Jenis tanaman yang paling menghasilkan di lahan garapan: ➤ Ya/jenis tanaman kehutanan ➤ Tidak/jenis tanaman lainnya
	Ketersediaan lapangan pekerjaan.	Kesempatan kepada anggota keluarga lain untuk bekerja di lahan garapan, diukur melalui ada atau tidaknya anggota keluarga yang membantu mengolah lahan.	Anggota keluarga yang membantu di lahan garapan: ➤ Ya/ada ➤ Tidak/tidak ada
4.	Kondisi ekologi petani HTR KPHP Gedong Wani	Suatu keadaan yang dihasilkan oleh interaksi yang terjadi antara suatu masyarakat dengan lingkungannya.	Ordinal

Biologi lingkungan	Unsur biotik atau organisme hidup yang ada di dalam suatu lingkungan, diukur melalui jenis tanaman yang dimiliki responden, perubahan jenis tanaman di lahan garapan, jumlah tanaman, dan usia tanaman.	Jenis tanaman: ➤ Kayu-kayuan/kehutanan ➤ MPTS ➤ Pangan/pertanian ➤ Semak belukar/hortikultura ➤ Perkebunan ➤ Rumput-rumputan
		Jumlah tanaman: ➤ < 400/ha ➤ > 400/ha
		Usia tanaman: ➤ < 5 ➤ 5-10 ➤ > 10
		Perubahan jenis tanaman: ➤ Ya/ada ➤ Tidak/tidak ada
Fisik lingkungan	Unsur abiotik atau benda-benda mati yang berpengaruh pada makhluk hidup, diukur melalui kesuburan lahan, kuantitas sumber air, kualitas air, dan kualitas sungai di areal HTR KPHP Gedong Wani.	Kesuburan lahan: ➤ Ya/bertambah ➤ Tidak/tidak bertambah
		Kuantitas sumber air: ➤ Ya/bertambah ➤ Tidak/tidak bertambah
		Kualitas air: ➤ Baik ➤ Buruk
		Kualitas sungai: ➤ Ya/pernah terjadi banjir ➤ Tidak/tidak pernah terjadi banjir
Cara penanaman	Pola tanam yang digunakan yaitu monokultur/sejenis atau polikultur/campuran/tumpang sari, diukur melalui tahu atau tidaknya responden terhadap pola tanam yang petani gunakan.	Pola tanam yang digunakan: ➤ Ya/mengetahui ➤ Tidak/tidak mengetahui
		Ordinal

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Kondisi sosial masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani tergolong cukup baik karena terdapat 5 indikator dari keseluruhan 8 indikator dengan persentase di atas 50% yaitu pengetahuan tentang tata batas kawasan, frekuensi pertemuan antar anggota kelompok tani, pembentukan jaringan sosial, transparansi dalam pemanfaatan sumber daya hutan; dan pengetahuan mengenai aturan HTR. Sedangkan indikator keterlibatan dalam pendampingan kelompok tani; frekuensi pelatihan budidaya dan teknologi; dan pelestarian budaya lokal memiliki persentase kurang dari 50%.
2. Kondisi ekonomi masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani tergolong cukup baik karena terdapat 3 indikator dari keseluruhan 5 indikator dengan persentase di atas 50% yaitu status kepemilikan rumah sendiri, kondisi rumah layak, dan pernyataan bahwa HTR menyediakan lapangan pekerjaan bagi anggota keluarga lain. Sedangkan indikator pernyataan bahwa jenis tanaman yang paling menghasilkan di lahan garapan adalah kayu-kayuan dan tingkat penerimaan HTR di atas Rp3.000.000,00 memiliki persentase kurang dari 50%.
3. Kondisi ekologi masyarakat penerima izin HTR di KPHP Gedong Wani tergolong kurang baik karena terdapat 5 indikator dari keseluruhan 9 indikator dengan persentase di bawah 50% yaitu tingkat kesuburan lahan, pertambahan kuantitas sumber air, peningkatan kualitas air, peningkatan kualitas sungai, dan perubahan jenis tanaman di lahan garapan menjadi kayu-kayuan setelah program HTR diterapkan. Sedangkan indikator pengetahuan mengenai jenis tanaman di lahan garapan, pengetahuan

mengenai jumlah tanaman, pengetahuan mengenai usia tanaman, dan pengetahuan mengenai cara penanaman memiliki persentase lebih dari 50%.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis terkait pengelolaan HTR di KPHP Gedong Wani yaitu perlunya pemfokusan pada pengembangan dan pemanfaatan lahan dengan pola agroforestri. Salah satu upayanya yaitu memberikan bantuan bibit yang bernilai ekologis sekaligus ekonomis dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan kondisi lahan. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan pelatihan dan pendampingan yang intensif terhadap masyarakat karena sosialisasi saja tidak cukup.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y. 2011. Analisis kemiskinan dan pendapatan keluarga nelayan kasus di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. 1 (1) : 50-58.
- Agusta, I. 2003. Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi*. 27 (10) : 179-188.
- Andrasmoro, D. dan Nurekawati, E. E. 2017. Analisis pengembangan kebijakan hutan tanaman rakyat (htr) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat dan di Yogyakarta. *Jurnal Swarnabhumi: Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi*. 2 (1) : 36-45.
- Andrian, A., Anggraini, R., dan Sugiarto, S. 2019. Analisis karakteristik responden dan atribut perjalanan terhadap pemilihan moda angkutan umum rute Banda Aceh–Tapaktuan. *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan*. 2 (4) : 294-305.
- Arikunto, S. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ayu, I. W., Sebayang, H. T., Prijono, S., dan Iskandar, S. 2018. Analisis karakteristik demografi dan sosial ekonomi petani lahan kering iklim kering di Dusun Brang Pelat, Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan*. 1 (2) : 70-79.
- Banuwa, I. S., Safe'i, R., Febryano, I. G., dan Novayanti, D. 2018. Strategi implementasi kebijakan hutan tanaman rakyat di KPH Gedong Wani. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*. 20 (1) : 29-38.
- Bungin. 2002. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Fajar Interpramata Offset. Jakarta.
- Cahyono, S. A., Jariyah, N. A., dan Indrajaya, Y. 2006. Karakteristik sosial ekonomi yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga penyadap getah pinus di Desa Somagede, Kebumen, Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 3 (2) : 147-159.

- Damanik, S. E. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan*. Uwais Inspirasi Indonesia. Ponorogo.
- Damanik, S. E., dan Purba, S. 2019. Perencanaan pola kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan petani KPH XIII Kawasan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. *Sebatik*. 23 (2) : 582-591.
- Dewi, I. N., Andayani, W., dan Suryanto, P. 2018. Karakteristik petani dan kontribusi hutan kemasyarakatan (HKm) terhadap pendapatan petani di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 12 (1) : 86-98.
- Dharmawan, A. H. 2007. Dinamika sosio-ekologi pedesaan: perspektif dan pertautan keilmuan ekologi manusia, sosiologi lingkungan dan ekologi politik. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 1 (1) : 1-40.
- Diesendorf, M. dan Hamilton, C. 1997. *Human Ecology, Human Economy: Ideas for an Ecologically Sustainable Future*. Allen and Unwin. Australia.
- Ekawati, S. 2013. Evaluasi implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan hutan produksi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 10 (3) : 187-202
- Faradhana, A., Herwanti, S., dan Kaskoyo, H. 2019. Peran hutan tanaman rakyat dalam meningkatkan pendapatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani. *Jurnal Belantara*. 2 (2) : 104-111.
- Fatahyah, F. 2018. *Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Salut Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara*. Disertasi. Universitas Mataram. Nusa Tenggara Barat.
- Fazayanti, Q. N. 2019. *Analisis Sosial Ekonomi Dan Ekologi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Febriani, D., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., dan Wijayanto, N. 2012. Strategi implementasi kebijakan hutan tanaman rakyat di Kabupaten Sarolangun, Jambi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 9 (2) : 81-95.
- Ilfa, A. A., Supratman, S., dan Samsu, A. K. A. 2020. Tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan tanaman rakyat Dusun Tampaning Desa Patampanua Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. *Jurnal Eboni*. 2 (1) : 30-38.
- In, A. W. K. dan Asyik, N. F. 2019. Pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*. 8 (8). 1-15.

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor SK. 256/Kpts-II/2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan.

Lambajang, A. A. 2013. Analisis perhitungan biaya produksi menggunakan metode variabel costing pt. tropica cocoprima. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 1 (3) : 673-683.

Lathifah, Z., dan Lubis, D. P. 2018. Hubungan penggunaan media sosial dengan perkembangan usaha kecil dan menengah kuliner wilayah Solo raya. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. 16 (1) : 75-88.

Martapani, A. N., Fauzi, H., dan Naparin, M. 2021. Dampak hutan kemasyarakatan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat (studi pada masyarakat peduli gambut Sukamaju, KPH Kayu Tangi). *Jurnal Rimba Lestari*. 1 (1) : 36-46.

Micklin, M. dan Poston Jr., D. L. 1998. *Continuities in Sociological Human Ecology*. Plenum Press. New York dan London.

Musianto, L. S. 2002. Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*. 4 (2) : 123-136.

Novayanti, D. 2018. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di KPH XIV Gedong Wani*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Nugroho, B. 2018. *Strategi Penguatan Kelembagaan HTR di Tingkat Lokal*. Disampaikan pada Focus Group Discussion “Hambatan dan Strategi Pengembangan Kelembagaan HTR di Tingkat Nasional dan Lokal”. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim. Bogor.

Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., dan Sirodj, R. A. 2024. Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 10 (17) : 826-833.

Pasha, R., dan Susanto, A. 2009. Hubungan kondisi sosial ekonomi masyarakat perambah hutan dengan pola penggunaan lahan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 5 (2) : 82-94.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2000 Tentang Hutan Tanaman Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

- Prasetyo, D. E., Atmanegara, F. K., Zulfikar, F., dan Purwanti, H. S. 2014. Kajian sosio-ekologis kawasan mangrove di pesisir pantai Kecamatan Biduk-Biduk, Kalimantan Timur. *Omni-Akuatika*. 10 (1) : 1-9.
- Prasetyo, B. D. 2009. Kajian sosial ekonomi implementasi hutan tanaman rakyat di Desa Tetaf, Kabupaten Timor. *Info Sosial Ekonomi*. 9 (1) : 1-18.
- Prasojo, B. D., Itta, D., dan Hafizianor, H. 2021. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pelaksana program hutan desa di Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sylva Scientiae*. 4 (4) : 732-740.
- Rachman, I. 2022. Pengembangan hutan tanaman rakyat di wilayah KPHP model Dampelas Tinombo Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala. *Agroland: Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian*. 29 (1) : 13-23.
- Raharjo, K. D., dan Ulifah, C. N. 2014. *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian*. PT Kanisius. Yogyakarta.
- Rahma, N., Susilowati, I., dan Purwanti, E. Y. 2017. Minat wisatawan terhadap makanan lokal Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 18 (1) : 53-76.
- Rahmawati, H. 2016. Local wisdom dan perilaku ekologis masyarakat Dayak Benuaq. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 13 (1) : 72-78.
- Romli, K. 2010. The relation dynamics between javanese migrants and lampung community of Lampung Selatan regency, Lampung province (a study of intercultural communication). *Kom & Realitas Sosial: Jurnal Ilmu Komunikasi*. 1 (1) : 1-22.
- Salaka, F. J., Alviya, I., Suryandari, E. Y., Nurfatriani, F., dan Muttaqin, M. Z. 2020. Efektivitas kelembagaan pengelolaan hutan tanaman rakyat di tingkat lokal. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 17 (1) : 75-92.
- Samosir, Y. N. O., Purwoko, A., dan Herianto, H. 2015. Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan hutan tanaman rakyat (studi kasus Koperasi Rakyat Pantai, Desa Pangkalan Siata, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat). *Peronema Forestry Science Journal*. 4 (4) : 200-214.
- Sanjaya, P. K. A. 2020. *HUTAN LESTARI Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya*. UNHI Press. Bali.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Senoaji, G. 2011. Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Hutan Lindung Bukit Daun di Bengkulu. *Sosiohumaniora*. 13 (1) : 1-17.

- Sholehati, M. A. 2017. *Pengaruh Aglomerasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2011-2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Disertasi. UIN Raden Intan Lampung. Lampung.
- Sihombing, Y., dan Hutahaean, L. 2019. Hubungan karakteristik petani dengan usaha tani padi sebelum dan sesudah pendampingan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. *Edufortech*. 4 (2) : 92-105.
- Simon, H. 2001. *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat (Cooperative Forest Management) Teori dan Aplikasi pada hutan Jati di Jawa*. Bigraf Publishing. Yogyakarta.
- Singarimbun, M. 1987. *Metode Penelitian Survai*. LP3ES. Jakarta.
- Sriyono, S. 2004. Karakteristik demografi dan tingkat pendapatan pemulung di TPA Jatibarang Kota Semarang. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*. 2 (3) : 243-251.
- Subaktini, D., Andi, C., Nana, H., dan Teguh, S. 2002. Kajian aspek sosial, budaya, dan ekonomi pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Wonogiri. *Prosiding Ekspose BP2TPDAS-IBB Surakarta-Wonogiri*. 1.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sumargo, B. 2020. *Teknik Sampling*. UNJ Press. Jakarta Timur.
- Sunuharjo, B. dan Ruhana, I. 2016. Pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan (studi pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel Jatim Selatan, Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis STI Univ. Brawijaya*. 34 (1) : 38-46.
- Surachman, I. F., Indriyanto, dan Hariri, A. M. 2014. Inventarisasi hama persemaian di hutan tanaman rakyat desa ngambur Kecamatan Bengkunat Belimbing Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Sylva Lestari*. 2 (2) : 7-16.
- Sylviani, S., dan Hakim, I. 2014. Analisis tenurial dalam pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH): studi kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 11 (4) : 309-322.
- UPTD KPH Gedong Wani. 2013. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Gedong Wani 2014 – 2023*. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPH) Gedong Wani Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Lampung.

- Verbist, B., dan Pasya, G. 2004. Perspektif sejarah status kawasan hutan, konflik dan negosiasi di Sumberjaya, Lampung Barat-Propinsi Lampung. *Jurnal Agrivita*. 26 (1) : 20-28.
- Watung, N., Dien, C.R., dan Kotambunan, O.V. 2013. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Propinsi Sulawesi Utara. *AKULTURASI: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*. 1 (2) : 47-108.